



Jurnal Civic Education:

Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3467 (online)

Analisis kesulitan guru dalam mengembangkan materi UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi

Winarno^{1*}, Moh. Muchtarom², Erna Yuliandari³, Machmud AR⁴, Rusnaini⁵, Anis Suryaningsih⁶

Program studi PPKn, FKIP UNS Surakarta

¹ winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id*, muhtarom1974@staff.uns.ac.id, ernayuliandari@staff.uns.ac.id, machmudalrasyid@staff.uns.ac.id, rusnaini@staff.uns.ac.id, anissuryaningsih@staff.uns.ac.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel :
Diterima : 20 September 2021
Revisi : 04 Oktober 2021
Dipublikasikan : 10 Desember 2021

ABSTRAK

Kata kunci:

PPKn
Materi Pembelajaran
Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan hukum yang bersifat final dan mengikat yang dapat dijadikan sumber materi bagi isi PPKn khususnya pada lingkup materi UUD 1945. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesulitan guru PPKn SMP dalam mengembangkan materi UUD 1945 yang berbasis pada putusan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan deskriptive kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan guru PPKn SMP Wonogiri dan pakar bidang hukum, analisis dokumen terhadap buku ajar PPKn SMP dan kurikulum PPKn 2013, ditunjang dengan *Focus Group Discussion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan materi UUD 1945 yang berbasiskan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Materi UUD 1945 dari PPKn jenjang SMP masih sederhana dan tidak membutuhkan sumber materi yang banyak dan materi yang sulit seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Pengembangan materi yang berbasis putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan manakala menemui kasus atau masalah konstitusional penyelenggaraan bernegara yang tidak termuat dalam sumber materi lain dan membatasi pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan, pemilu, partai politik. Guru bisa memulai materi pengenalan dan menggunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan materi pembelajaran yang berketrampilan berpikir tinggi. Oleh karena itu, pengembangan materi UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi pada mapel PPKn di SMP dapat dikembangkan sesuai dengan tahapan berpikir peserta didiknya.

Keywords:

PPKn
Learning materials
Constitutional Court Decision

ABSTRACT

Analysis of teacher difficulties in developing the material for the the 1945 Constitution based on the decision of the Constitutional Court. The decision of the Constitutional Court is a final and binding legal decision that can be used as a source of material for the content of Civics, especially in the scope of the 1945 Constitution material. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used interviews with PPKn SMP Wonogiri teacher informants and experts in the field of law, document analysis of the PPKN SMP textbooks, and the 2013 Civics Education curriculum, supported by Focus Group Discussion. The results showed that teachers had difficulty in developing the material for the 1945 Constitution based on the decisions

of the Constitutional Court. The material for the 1945 Constitution of the Junior High School level Civics is still simple and does not require many sources of material and difficult material such as the decision of the Constitutional Court. The development of materials based on the decisions of the Constitutional Court can be carried out by encountering cases or constitutional problems in the administration of the state that is not contained in other sources of material and limiting the decisions of the Constitutional Court related to constitutional issues, elections, political parties. Teachers can start the introduction material and use the decisions of the Constitutional Court as learning materials with high thinking skills. Therefore, the development of material for the 1945 Constitution based on the decision of the Constitutional Court in the Civics Education subject in junior high schools can be developed according to the stages of thinking of the students.

Copyright © 2021 (Winarno, Moh. Muchtarom, Erna Yuliandari, Machmud AR, Rusnaini, Anis Suryaningsih). All Right Reserved

Pendahuluan

Berdasarkan kurikulum 2013, materi pokok mata pelajaran PPKn mencakup 4 (empat) ruang lingkup yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu materi muatan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut adalah ruang lingkup UUD NRI 1945. Dinyatakan bahwa materi UUD NRI 1945 adalah sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Kemendikbud, 2014). Pemahaman yang benar tentang materi sangat diwajibkan bagi guru, karena guru bertugas menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga materi yang disampaikan harus merupakan materi yang benar dan terbaru. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Krathwohl, 2002) sekaligus diadopsi oleh Kurikulum 2013 yang menyebutkan tentang dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan metakognitif. Berdasarkan hal tersebut maka apabila evaluasinya diminta untuk menggunakan HOTS agar supaya anak terbiasa berpikir kritis dan analitis untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan sehingga bisa tetap mempunyai eksistensi maka dituntutlah materi atau bahan ajar yang memungkinkan siswa untuk mencapai hal itu (Rasyid, 2017). Namun kenyataan di lapangan guru-guru SMP selama ini hanya menggunakan bahan ajar berupa buku teks dan LKS untuk materi kajian berbasis UUD 1945 Padahal salah satu bahan ajar yang bisa digunakan oleh guru untuk kajian UUD 1945 adalah Putusan Mahkamah konstitusi dimana putusan Mahkamah konstitusi ini merupakan keputusan yang bersifat final, sehingga mengikat warganegara untuk mentaatinya. Hal demikian didasarkan pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final. Hal ini dapat diartikan bahwa Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Putusan MK tersebut tidak hanya mengikat warga negara tetapi semua warga Indonesia atau semua komponen bangsa, sebab walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi (Safa'at, 2014).

Berdasar wawancara awal, bahwa guru-guru PPKn jenjang SMP jarang sekali bahkan bisa dikatakan belum pernah menggunakan contoh putusan MK sebagai sumber materi PPKn yang dibelajarkan kepada peserta didik. Sumber materi yang digunakan sebatas pada buku siswa yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan modul PPKn yang disusun. Berdasarkan hal tersebut di atas, penting dilakukan kajian tentang kesulitan apa

sajakah yang selama ini menjadi kendala guru PPKn dalam mengembangkan materi kajian UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya perlu pengembangan materi kajian UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan ajar SMP agar terjadi konsistensi materi kajian UUD 1945, mengingat putusan mahkamah konstitusi ini bersifat final dan mengikat semua warga negara, yang berarti dapat dijadikan sumber materi bagi pembelajaran PPKn.

Sejalan dengan latar dan permasalahan yang muncul di atas, maka masalah di penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa sajakah kesulitan yang dialami guru PPKn jenjang SMP dalam upayanya mengembangkan materi Kajian UUD 1945 berbasis Putusan Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimanakah materi pengembangan Kajian UUD 1945 berbasis Putusan Mahkamah Konsistensi? Sejalan dengan masalah penelitian di atas, tujuan penelian adalah: 1) Menemukan dan mengkategorikan aspek aspek kesulitan yang dialami guru PPKn jenjang SMP dalam mengembangkan materi kajian UUD 1945 berbasis Putusan Mahkamah Konstitusi, 2) Menyusun materi pengembangan kajian UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah konstitusi. Adapun manfaat penelitian yang dapat digunakan adalah :1) Ditemukannya aspek aspek kesulitan yang dialami guru PPKn jenjang SMP dalam mengembangkan materi kajian UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi dan 2) Tersusunnya materi pengembangan kajian UUD 1945 pada materi PPKn jenjang SMP berbasis putusan Mahkamah konstitusi.

Metode

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menggunakan metode deskriptif, karena bermaksud untuk melakukan penyelidikan dengan memaparkan obyek dan subyek penelitian berdasarkan fakta yang tampak (Moleong, 2017). Sumber data adalah guru PPKn jenjang SMP yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kabupaten Wonogiri, dan pakar bidang terkait materi dan pembelajaran PPKn sebagai informan, buku ajar PPKn jenjang SMP dan kurikulum PPKn 2013 sebagai pustaka. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan kalimat, analisis dokumen maupun arsip yang memiliki arti yang sangat lebih dari sekedar angka. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, analisis dokumen dan *focus group discussion* (FGD).

Kelompok informan pertama adalah 6 (enam) guru PPKn jenjang SMP yang mengampu di 6 SMP berbeda di wilayah kabupaten Wonogiri. Penetapan ini didasarkan pertimbangan agar data yang sama dapat diperoleh dari banyak informan sehingga memiliki keragaman sumber data. Kelompok informan kedua adalah 3 (tiga) orang pakar bidang hukum yakni dosen hukum dari UNS dan Universitas Negeri Semarang. Pertimbangannya adalah 3 (tiga) orang pakar ini memang menguasai bidang hukum dan pernah dilibatkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam kegiatan penulisan buku ajar PPKn. Dokumen yang dianalisis adalah Rumusan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PPKn jenjang SMP yang termuat di Permendikbud No 37 Tahun 2018. Dokumen kedua adalah buku ajar yang digunakan di sekolah yakni buku siswa PPKn SMP terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi 2017 dan modul siswa. *Focus Group Discussion* untuk mengkonfirmasi temuan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 dengan menghadirkan informan guru dan pakar.

Analisis dilakukan secara interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), yaitu reduksi, penyajian, dan pengambilan simpulan dilakukan secara interaktif. Simpulan yang dihasilkan adalah sajian tentang kesulitan guru PPKn dalam mengembangkan dan membelajarkan materi PPKn aspek UUD 1945 dan kerangka isi materi ajar PPKn aspek UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab masalah penelitian, terlebih dahulu diawali dengan identifikasi perihal materi pada ruang lingkup UUD 1945 pelajaran PPKn jenjang SMP. Adanya materi UUD 1945 tersebut termuat di Permendikbud RI No 37 Tahun 2018. Terjabarkan di kompetensi dasar pengetahuan atau KD 3. Rumusan kompetensi dasar 3 mencerminkan kompetensi dan materi pembelajaran baik di kelas VII, VIII dan IX perihal ruang lingkup UUD 1945 yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rumusan KD 3 dan materi pembelajaran perihal ruang lingkup UUD 1945

Kelas	Kompetensi Dasar	Rumusan Kompetensi	Materi Pembelajaran
VII	3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	Memahami	Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
	3.3 Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menganalisis	Sejarah perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
VIII	3.2. Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan undangan lainnya dalam sistem hukum nasional	Menelaah	Makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundangan undangan lainnya dalam sistem hukum nasional
	3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam system hukum nasional nasional di Indonesia	Memahami	Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam system hukum nasional nasional di Indonesia
IX	3.2 Mensintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	Mensintesis	Isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	3.3 Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945	Memahami	Bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

(Sumber: Lampiran 19, Permendikbud No 37 Tahun 2018)

Selanjutnya pada buku siswa maupun buku guru mapel PPKn juga ditemukan materi ruang lingkup UUD NRI 1945. Contoh pada buku PPKn kelas VII, Kemendikbud tahun 2017 Edisi Revisi.

Bab 2 Norma dan Keadilan	33
A. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat	34
B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan	46
C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari	53
Rangkuman	58
Proyek Kewarganegaraan	59
Penilaian Sikap.....	59
Uji Kompetensi 2.....	61
Pemahaman Materi.....	62
Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	63
A. Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	64
B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia.....	71
C. Peran Tokoh Perumus UUD 1945.....	74

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Gambar 1. Materi ruang lingkup UUD NRI 1945 pada buku siswa
(Sumber: PPKn VII, buku Siswa, Puskurbuk, Balitbang, Kemendikbud, 2017)

Berdasar dokumen tersebut, benar bahwa ruang lingkup UUD 1945 menjadi materi pembelajaran mata pelajaran PPKn sekolah jenjang SMP. Berdasar data, materi UUD 1945 pelajaran PPKn jenjang SMP memuat 6 (enam) butir penjabaran materi mulai dari kelas VII, VIII dan IX. Materi tersebut secara singkat adalah 1) Norma dalam kehidupan, 2) Sejarah UUD 1945, 3) Kedudukan dan fungsi UUD 1945, 4) Tata urutan perundangan, 5) Isi dan Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dan 5) Bentuk dan Kedaulatan negara berdasar UUD 1945. Selain menggunakan buku PPKn terbitan Kementerian, guru juga menggunakan modul yang disusun oleh MGMP PPKn SMP Kabupaten Wonogiri. Modul tersebut dijadikan bahan ajar bagi semua siswa. Setiap siswa diminta memiliki modul tersebut.

Pada proses penyusunan RPP, terdapat beberapa pokok yang harus diperhatikan, yaitu menetapkan standar nilai yang menjadi prioritas, merumuskan indikator-indikator yang jelas, menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan metode dan model pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, memaparkan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dan terakhir menetapkan proses dan instrumen penilaiannya (Sampul, Kerebungu, & Lonto, 2021). Informan guru secara umum menyatakan bahwa materi UUD 1945 pada pelajaran PPKn SMP telah dibelajarkan kepada siswanya. Hal ini dibuktikan dengan telah disusun dan dilaksanakannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya memuat Kompetensi Dasar perihal UUD 1945.

Berikut ini dicukilkan contoh bagian dari RPP guru yang menunjukkan guru telah mengembangkan RPP yang bermuatan materi UUD 1945 pada bagian tujuan pembelajaran, sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan pembelajaran pada RPP yang bermuatan materi UUD 1945

Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1

- 1.3.1.1 Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mengucap rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sungguh – sungguh
- 1.3.2.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan perilaku bangga memiliki nilai luhur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
- 2.3.1.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai peran pendiri Negara dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan santun
- 2.3.2.1 Melalui kegiatan diskusi serta praktik peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tanggung jawab.
- 3.3.1.1 Dengan membaca buku paket peserta didik mampu menjelaskan sidan remi BPUPKI.
- 3.3.1.2. Dengan berdiskusi peserta didik mampu menyebutkan 3 panitia kecil yang dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945.
- 3.3.1.3 Dengan membaca buku peserta didik diharapkan mampu menjelaskan alasan ditambahnya anggota PPKI sebelum sidang.
- 3.3.1.4. Dengan metode kooperatif script peserta didik mampu menyebutkan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
- 3.3.1.5. Dengan metode Kooperatif Script peserta didik pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertemuan 2

- 1.3.1.1 Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mengucap rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sungguh – sungguh
- 1.3.2.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan perilaku bangga memiliki nilai luhur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik
- 2.3.1.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai peran pendiri Negara dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan santun
- 2.3.2.1 Melalui kegiatan diskusi serta praktik peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tanggung jawab.
- 2.3.3.1 Melalui kegiatan penugasan peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap arti penting UUD Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab
- 3.3.3.1 Dengan membaca buku paket peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia
- 4.3.2.2 Dengan membaca buku paket peserta didik diharapkan dapat menjelaskan nilai-nilai luhur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bangga
- 4.3.2.3 Dengan membaca buku paket peserta didik mampu menjelaskan peran tokoh perumus UUD Negara republic Indonesia Tahun 1945 dengan baik

Pertemuan 3

1.3.1.1 Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mengucap rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sungguh – sungguh

1.3.2.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan perilaku bangga memiliki nilai luhur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik

2.3.1.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai peran pendiri Negara dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan santun

2.3.2.1 Melalui kegiatan diskusi serta praktik peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tanggung jawab.

2.3.3.1 Melalui kegiatan penugasan peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab

3.3.4.1 Dengan membaca buku paket peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.3.4.2 Dengan membaca buku paket dan mengamati tayangan video, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nilai kesejarahan perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.3.3.1 Dengan membaca buku paket peserta didik diharapkan mampu menunjukkan nilai kesejarahan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertemuan 4

1.3.1.1 Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mengucap rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sungguh – sungguh

1.3.2.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan perilaku bangga memiliki nilai luhur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik

2.3.1.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai peran pendiri Negara dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan santun

2.3.2.1 Melalui kegiatan diskusi serta praktik peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tanggung jawab.

2.3.3.1 Melalui kegiatan penugasan peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab

3.3.4.3 Dengan berdiskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu memiliki tanggungjawab untuk memahami UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara utuh.

3.3.4.4 Dengan membaca buku paket peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peranan para pendiri Negara dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.3.3.2 Dengan berdiskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu menampilkan perilaku perwujudan semangat para pendiri Negara dalam merumuskan dan mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pertemuan 5

1.3.1.1 Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mengucap rasa syukur atas anugerah Tuhan bangsa Indonesia memiliki UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sungguh – sungguh

1.3.2.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan perilaku bangga memiliki nilai luhur UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik

2.3.1.1 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai peran pendiri Negara dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan santun

2.3.2.1 Melalui kegiatan diskusi serta praktik peserta didik mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dalam perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tanggung jawab.

2.3.3.1 Melalui kegiatan penugasan peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap arti penting UUD Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab

3.3.4.5 Dengan berdiskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan hasil telaah arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan Negara Indonesia .

4.3.3.3 Dengan berdiskusi kelompok peserta didik diharapkan mampu menyajikan laporan hasil telaah arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan Negara Indonesia.

4.3.3.4 Dengan berdiskusi kelompok peserta didik mampu menanggapi jawaban dari kelompok lain dengan penuh tanggung jawab

(Sumber: RPP PPKn SMP VII, SMP N 1 Wonogiri, 2020)

Berdasar analisis dokumen di atas, menunjukkan bahwa guru menyusun tujuan dalam ruang lingkup UUD 1945 melalui pembuatan RPP. Ruang lingkup itu dikembangkan kedalam rumusan indikator sebagai jabaran dari KD (kompetensi dasar) dan KI (kompetensi inti). KD dari KI 1, KD dari KI2, KD dari KI3 dan KD dari KI4 telah dijabarkan ke rumusan indikator yang dilanjutkan ke rumusan tujuan pembelajaran sebanyak 41 butir untuk 5 kali pertemuan. Rumusan tujuan pembelajaran ini telah pula menggambarkan materi.

Setelah merumuskan indikator dan tujuan, guru mengembangkan ruang lingkup UUD 1945 ke sub judul Materi Pembelajaran. Menurut guru, mereka menyusun materi di RPP tersebut dengan berpedoman pada guru (BG) dan kesepakatan bersama dalam MGMP. Menurut informan guru mereka tidak kesulitan menuliskan materi berdasar Kompetensi Dasar dan Indikator. Materi pembelajaran di RPP diringkas dari buku siswa dan modul. Berikut adalah contoh materi di RPP berdasar pada tujuan pembelajaran di pertemuan 1 dan 2, sebagai berikut:

Tabel 3. Materi pembelajaran di RPP

<p>Materi Pembelajaran Reguler</p> <p>Pertemuan 1</p> <p>UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>a. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dalam sidang BPUPKI, sidang pertama pada 29 Mei – 1 Juni 1945 kemudian dilanjutkan pada sidang kedua pada 10 – 17 Juli 1945. Dalam sidang pertama dibahas tentang Dasar Negara sedangkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dilakukan pada sidang yang kedua.</p> <p>Pertemuan 2</p> <p>b. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai lembaga yang menggantikan BPUPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945 melaksanakan sidang dengan salah satu keputusannya adalah Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>
--

(Sumber: RPP PPKn SMP VII, SMP N 1 Wonogiri, 2020)

Materi ruang lingkup UUD 1945 diakui oleh informan guru, ada dan telah diajarkan ke siswanya baik di kelas 7, 8 dan kelas 9 pada mata pelajaran PPKn. Materi pembelajaran menjadi substansi atau bahan yang akan disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar (Djamarah, 2006). Materi pembelajaran dalam mata pelajaran PPKn itu, misal materi tentang norma-norma yang ada baik di rumah, sekolah dan masyarakat mengenai sejarah UUD 1945, dan Tata Urutan Perundangan. Namun demikian, di masa pandemik dengan pembelajaran jarak jauh ini, tidak semua materi diberikan. Informan menyebut ini sebagai “kurikulum darurat” atau KD esensial”, karena ada Kompetensi Dasar (KD) yang dikurangi. Meskipun sedang dalam masa pandemi, Guru tetap harus memiliki pemikiran, ide, gagasan kreatif dan inovatif, agar tetap dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermaknabagi siswanya (Akbal, Umar, & Herman, 2020). Berdasar wawancara dan modul yang digunakan untuk ruang lingkup UUD 1945 jenjang SMP, materi yang disajikan adalah 1) Perumusan dan Pengesahan UUD 1945 sebagai Dasar Negara, 2) Menumbuhkan Kesadaran terhadap UUD 1945, 3) Memaknai Peraturan Perundangan, 4) Pembukaan UUD 1945 (Dokumen wawancara, Juli 2021).

Guru harus memiliki kompetensi dalam mengembangkan materi. Penguasaan berbagai ketrampilan akan mencerminkan kompetensi profesional seorang guru, khususnya pada penguasaan dan pengembangan materi ajar, merencanakan pembelajaran dalam bentuk silabus, RPP, materi ajar, LKPD, dan kemampuan penguasaan pembelajaran terkait dengan pembaharuan, serta dalam implementasi pada pembelajaran praktis (Muhibbin & Sumarjoko, 2016). Mengenai materi, informan guru mengatakan tidak merasa mengalami kesulitan ketika mencari sumber materi tentang ruang lingkup UUD 1945. Mereka mendapatkan materi tersebut di buku guru, buku siswa terbitan Kemendikbud dan juga modul. Bahkan sebagian besar guru menggunakan modul buatan kelompok MGMP SMP Kabupaten Wonogiri. Ketika diminta pendapatnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu sumber materi UUD 1945, informan guru menyatakan bahwa,

“Mengenai putusan MK sebagai sumber materi, kami belum pernah menggunakan. Tetapi kami pernah menyampaikan materi mengenai cara atau prosedur mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi”. (Dokumen wawancara, Juli 2021)

Menurut informan guru, mereka memang belum atau bahkan tidak pernah menggunakan contoh putusan MK sebagai salah satu sumber materi UUD 1945 di PPKn jenjang SMP. Hal ini dikarenakan contoh-contoh materi atau kasus ketika membelajarkan UUD 1945 tidaklah rumit, dan materi hanya terbatas pada norma-norma atau pasal-pasal yang ada di UUD 1945. Informan guru lain menyebut bahwa materi yang sulit itu justru materi yang sifatnya hafalan, misalnya menghafalkan bunyi pasal-pasal, atau mengingat isi pasal di UUD 1945. Materi UUD 1945 di SMP belum sampai pada kasus-kasus yang sulit yang perlu mencari sumber referensi atau bahan ajar lain. Buku siswa dari Pemerintah, modul dan buku dari penerbit swasta sudah cukup bisa untuk membelajarkan materi UUD 1945. Guru merasa belum pernah mengalami kesulitan dalam mengembangkan materi UUD 1945, sehingga perlu mencari sumber lain seperti Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagian informan guru belum menyadari dan belum paham sepenuhnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi salah satu sumber materi bagi UUD 1945 yang pada hakekatnya merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Salah satu informan guru, menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk yurisprudensi.

Menurut informan pakar 1, Putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan yurisprudensi, sebab jika yurisprudensi itu putusan atas perkara riil dalam pengadilan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap merupakan putusan pengadilan, yang bersifat final dan mengikat. Menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi bisa diacu sebagai sumber materi pembelajaran yang benar valid. Namun sifatnya kasuistis, menyangkut salah satu putusan terkait dengan suatu undang undang. Sebab memang putusan Mahkamah Konstitusi ini lebih banyak pada putusan sesuai dengan kewenangannya yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Disamping kewenangan lain yaitu 1) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, 2) memutus pembubaran partai politik, dan 3) memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan demikian, menurut pakar 1, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk dijadikan sumber pengembangan materi UUD NRI 1945 adalah putusan Mahkamah Konstitusi dari permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, dibanding Putusan Mahkamah Konstitusi yang lain misal putusan mengenai hasil Pemilihan Umum, karena Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilu memuat hal-hal yang sangat teknis dengan bahasan politis yang memuat alat bukti hingga fakta persidangan (Dokumen Wawancara, Juli 2021).

Perihal mengapa putusan MK ini jarang dijadikan materi pembelajaran, menurut pakar 1 karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif - litigasi dengan produk/ putusan Mahkamah Konstitusi yang lahir adalah penafsiran-penafsiran rigid gramatikal dan substansial terhadap konstitusi, yang berupa argumentasi hukum oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai hasil putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disebut (hanya) sebagai wujud pengejawantahan eksistensi konstitusi, namun bukan sebagai instrument hukum yang masuk dalam hirarkie peraturan perundang-undangan. Karena tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundangan maka menjadi jarang diketahui orang awam, terkecuali orang-orang tertentu yang memang membutuhkan isi dari putusan itu.

Meskipun demikian, menurut pakar 1, putusan Mahkamah Konstitusi tetap bisa menjadi salah satu sumber materi pembelajaran yang berkualifikasi benar atau valid karena sifatnya yang final dan mengikat. Hanya saja karena putusannya terkait dengan suatu undang undang tertentu dan bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundangan maka jarang diketahui

banyak pihak. Guru guru PPKn tetap bisa memanfaatkan suatu putusan Mahkamah Konstitusi manakala menemui kasus atau masalah konstitusional penyelenggaraan bernegara yang tidak termuat dalam sumber materi lain. Satu persyaratan penting yang harus dimiliki guru adalah kemampuan kreatif dan ketrampilannya dalam menelusuri putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan kasus yang dihadapinya. Penelusuran putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara online sebab semuanya itu sudah dimuat di laman Mahkamah Konstitusi. Rekomendasi lain yang bisa dilakukan menurutnya adalah guru bisa memulai materi pengenalan tentang Mahkamah Konstitusi, struktur dan fungsinya, lalu menugaskan siswa siswanya untuk mencari contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang ada di media online tersebut.

Informan pakar 2, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu jumlahnya banyak sekali, mungkin sudah mencapai 1400 putusan sampai saat ini. Putusan itu beragam dan menyangkut banyak aspek masalah dan aspek kehidupan kenegaraan. Ragam putusan itu ada yang diterima, dikabulkan, ditolak, tidak diterima, atau dikabulkan Sebagian. Jadi kalau mau dibawa ke materi pembelajaran PPKn mau cari putusan yang mana? Inilah yang menjadi kesulitan bagi guru guru PPKn. Selanjutnya dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memang dapat menjadi salah satu rujukan materi di PPKn, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final, mengikat semua dan bisa dijadikan rujukan yang valid. Putusan MK merupakan hal yang penting sebab lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan lembaga negara yang bertugas memberi penafsiran atas konstitusi secara syah. (Dokumen Wawancara tanggal 9 Juli 2021).

Perihal cara menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai materi pembelajaran PPKn, pakar 2 merekomendasikan perlunya membatasi pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan, pemilu, partai politik. Misalnya diawali dengan pengenalan suatu undang-undang, maka guru PPKn dapat mengecek apakah isi undang-undang tersebut sudah sebagian atau seluruhnya diajukan perkara pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. Apakah undang-undang tersebut memiliki kekuatan hukum berlaku? Dengan proses ini guru PPKn bisa dipandang telah menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu sumber materi.

Informan Pakar 3 menyatakan bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang yang bersifat mengikat bagi semua komponen bangsa. Oleh karena itu, baik penyelenggara negara maupun seluruh warga negara harus mentaati putusan tersebut. Hal ini menandakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai norma hukum yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Permohonan pengujian terhadap UU yang dilakukan akan mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat untuk dijadikan bahan atau sumber belajar dalam materi tata urutan perundangan di Indonesia dan norma hukum yang berlaku dalam materi mata pelajaran PPKn. Pengembangan materi UUD 1945 berbasis putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan karena putusan ini berisi pendapat atau argumentasi hukum yang bisa digunakan untuk bahan materi pembelajaran yang menuntut berketrampilan berpikir tinggi (HOTS). (dokumen wawancara , Juli 2021)

Menurut informan pakar 2 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat sehingga penyelenggara negara maupun warganegara harus mentaati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sedangkan untuk penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu sumber bahan ajar PPKn dapat digunakan untuk melatih siswa berpikir kritis dalam menyelesaikan dan menganalisis permasalahan yang ada. Penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyusun materi ajar UUD 1945 menjadikan guru dapat mengembangkan

materi yang disampaikan kepada siswanya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, materi yang membutuhkan tingkat penalaran tinggi dapat dijadikan bahan pengayaan di kelas.

Pengetahuan guru mengenai pengembangan materi merupakan hal yang sangat penting, karena materi ini merupakan sebuah pedoman bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dan menjadi substansi kompetensi yang seharusnya dilatihkan dan diajarkan kepada siswanya (Fahlevi & Sapriya, 2015). Selain itu, bagi seorang Guru PPKn, pemahaman yang benar tentang materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKn menjadi Kompetensi keilmuan pokok yang harus dimiliki (Winarno, 2013). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesulitan guru dalam mengembangkan materi UUD 1945 yang berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah guru belum pernah mengembangkan materi ajar berbasis putusan Mahkamah Konstitusi, karena materi yang diajarkan masih berupa contoh-contoh yang ringan. Kedua, informan guru belum menyadari dan belum paham sepenuhnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bisa menjadi salah satu sumber materi bagi UUD 1945 yang pada hakekatnya merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Oleh karena itu, guru PPKn perlu untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu sumber dalam mengembangkan materi ajar terkait UUD 1945 dengan menyesuaikan tingkatan peserta didiknya.

Berdasar temuan di atas dapat dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi salah satu sumber materi ajar PPKn terkait dengan materi UUD Tahun 1945 yang ada di jenjang SMP. Materi pembelajaran menjadi faktor penting untuk mewujudkan tujuan dalam proses pembelajaran dan mendorong semangat dan motivasi siswa untuk lebih giat belajar. Pengembangan bahan ajar juga sebaiknya menekankan pada prinsip *self instruction, self contained, stand alone, adaptatif dan user friendly* (Daryanto, 2013). Begitu pula pada proses penyusunan materi ajar dalam mata pelajaran PPKn di SMP. Pengembangan materi ajar PPKn berbasis putusan Mahkamah Agung ini dapat digunakan manakala menemui kasus atau masalah konstitusional penyelenggaraan bernegara yang tidak termuat dalam sumber materi lain dan karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final, mengikat semua dan bisa dijadikan rujukan materi yang valid. Guru bisa memulai materi pengenalan tentang Mahkamah Konstitusi, struktur dan fungsinya, kemudian menugaskan siswa siswanya untuk mencari contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang ada di media online dan membatasi pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan masalah ketatanegaraan, pemilu, partai politik. penggunaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi memuat pendapat atau argumentasi hukum dapat dipergunakan sebagai bahan materi pembelajaran yang berkecakupan berpikir tinggi, yaitu sebagai bahan pengayaan, dan sebagai salah satu materi penyusunan bentuk soal berpikir tinggi (HOTS) dengan disesuaikan pada tahapan tingkat berpikir peserta didik pada jenjang SMP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru PPKn mengalami kesulitan dalam mengembangkan materi UUD 1945 yang berbasiskan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Materi UUD 1945 dari PPKn jenjang SMP masih sederhana dan tidak membutuhkan sumber materi yang banyak dan materi yang sulit seperti putusan Mahkamah Konstitusi. Pengembangan materi UUD 1945 berdasar putusan Mahkamah Konstitusi belum pernah dilakukan dan belum ada kebutuhan mendesak yang menyebabkan guru belum menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan mengembangkan materi terkait

UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menjadi salah satu sumber materi ajar PPKn terkait dengan materi UUD Tahun 1945 yang ada di jenjang SMP. Pengembangan materi ajar PPKn berbasis putusan Mahkamah Agung ini dapat digunakan manakala menemui kasus atau masalah konstitusional penyelenggaraan bernegara yang tidak termuat dalam sumber materi lain dan karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final, mengikat semua dan bisa dijadikan rujukan yang valid materi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat digunakan sebagai bahan pengayaan, dan sebagai salah satu materi penyusunan soal yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis.

Referensi

- Akbal, M., Umar, F., & Herman. (2020). PKM Pengembangan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn. *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 67–74.
- Daryanto. (2013). *Menyusun Modul (Bahan Ajar untuk Persiapan Guru dalam Mengajar*. Yogyakarta: Penerbit Gava.
- Djamarah, S. B. (2006). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fahlevi, R., & Sapriya. (2015). Kreativitas Guru dalam Menyusun Bahan Ajar Pkn Pada Proses Pembelajaran Pkn di Kelas Akselerasi di SMAN 1 Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(1), 41–59. <https://doi.org/10.21009/jimd.v15i1.9110>
- Kemendikbud. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Puskurbuk.
- Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory into Practice*, 41(4), 212–218.
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Muhibbin, A., & Sumarjoko, B. (2016). Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis isu-isu kontroversial di media massa untuk meningkatkan sikap demokrasi mahasiswa dan implikasinya *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(1). Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/2035>
- Rasyid, M. A. (2017). Penguatan Kompetensi Profesional Guru Untuk Membentuk Warganegara yang Cerdas melalui Pilihan Isu dan tema Baru. *Seminar Nasional AP3KNI*. Surakarta: AP3KNI Jateng.
- Safa'at, M. A. (2014). *Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan MK*. Retrieved from <http://safaat.lecture.ub.ac.id/?s=Putusan+MK>
- Sampul, A. S., Kerebungu, F., & Lonto, A. L. (2021). Implementasi pendidikan karakter melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada SMA Lokon St.

Nikolaus Tomohon. *Jurnal Civic Educatioan: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 65–73.

Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.